



**PEMERINTAH KOTA BONTANG**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**I.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang adalah:

1. Untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
2. Untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang atas sumber daya yang dikelola.

**I.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

- a. Undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara; (khususnya pasal 23 ayat (1) : Anggaran Pendapatan dan Belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat);

- b. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah kota Bontang Tahun 2013 Nomor 4);
- l. Peraturan Walikota Bontang Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Kota Bontang;

- m. Peraturan Walikota Bontang Nomor 53 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **I.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan disusun sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- I.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- I.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- I.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

#### **BAB II RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

- II.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
  - II.1.1 Perkembangan Ekonomi Kota Bontang
  - II.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025
- II.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
  - II.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
  - II.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah
  - II.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

#### **BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD**

- III.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- III.2. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

#### **BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

- IV.1. Entitas Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
- IV.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- IV.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- IV.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

## **BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

- V.1. Rincian Dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan
  - V.1.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - V.1.2 Neraca
  - V.1.3 Laporan Operasional (LO)
  - V.1.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- V.2. Pengungkapan Atas Pos-Pos Aset Dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan Dengan Penerapan Basis Akrua Atas Pendapatan Dan Belanja Dan Rekonsiliasinya Dengan Penerapan Basis Kas

## **BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

- VI.1 Domisili Entitas
- VI.2 Sifat Operasi
- VI.3 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
- VI.4 Sumber Daya Manusia

## **BAB VII PENUTUP**

## BAB II

### RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

#### II. 1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2024 umumnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung sektor prioritas, dan mengentaskan kemiskinan. Adapun kebijakan ekonomi daerah tahun 2024 adalah:

1. Meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah
2. Memperkuat pengelolaan transfer ke daerah (TKD)
3. Meningkatkan efektivitas penggunaan TKD untuk mendukung program prioritas nasional
4. Meningkatkan harmonisasi kebijakan dan pengalokasian TKD
5. Mendorong pemerintah daerah menggunakan TKD untuk kegiatan produktif
6. Meningkatkan investasi, baik domestik maupun asing
7. Mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
8. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
9. Meningkatkan ekspor dan daya saing global
10. Mengembangkan transportasi massal, energi terbarukan, dan infrastruktur digital

Sesuai dengan tema RKP tahun 2024 “Pajak Kita, Untuk Kita” ditetapkan 7 prioritas nasional:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi
2. Mengembangkan wilayah
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur
6. Membangun lingkungan hidup
7. Meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim

Sejalan dengan prioritas nasional tersebut, dalam arahan kebijakan penyusunan RKPD tahun 2024 tema pembangunan Kota Bontang menetapkan tema “Peningkatan SDM Unggul & Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat yang Berkelanjutan”. Tema pembangunan tersebut memberikan arahan

pembangunan tahun 2024 dengan menekankan pada upaya pengembangan SDM dan ekonomi masyarakat yang ada di Kota Bontang.

## II.1.1 Perkembangan Ekonomi Kota Bontang

### II.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pasca pandemic COVID-19 laju pertumbuhan ekonomi Kota Bontang mulai menunjukkan peningkatan pada tahun 2021 dengan realisasi mencapai 1,6 persen dan kembali mengalami peningkatan menjadi 2,46 persen pada tahun 2022. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi ini tidak terlepas dari terjadinya peningkatan nilai tambah brutto pada lapangan usaha dominan seperti lapangan Industri Pengolahan, Konstruksi dan Perdagangan. Secara absolut kontribusi ketiga lapangan usaha tersebut menguasai 89,3 persen total PDRB pada tahun 2022, sehingga perannya menjadi sangat besar dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi Kota Bontang secara aggregate.

Kinerja Perekonomian tanpa migas juga menunjukkan peningkatan pertumbuhan dengan laju yang lebih tinggi. Perekonomian Kota Bontang tanpa migas mengalami pertumbuhan 5,36 persen (*y-o-y*) pada tahun 2022. Laju pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan tahun 2021 yang telah mencapai 3,84 persen.



Sumber: BPS Kota Bontang, 2024

Gambar 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang 2016-2022

Berdasarkan laju pertumbuhannya, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan paling signifikan adalah Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 10,12 persen, Transportasi dan Perdagangan sebesar 9,22 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,25 persen dan Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 8,15 persen. Sebaliknya, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan masih mengalami penurunan signifikan sebesar -11,21 persen pada tahun 2022.

Tabel 2. 1 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010  
Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan (perse)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	5,63	8,9	6,51	3,5	2,27	2,28
<b>B. Pertambangan dan Penggalan</b>	11,69	-14,48	-18,18	-10,77	-10,32	-11,21
<b>C. Industri Pengolahan</b>	-0,01	-5,63	-3,35	-3,77	1,63	1,64
<b>D. Pengadaan Listrik dan Gas</b>	6,99	5,05	7,92	12,32	-2,14	3,89
<b>E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang</b>	8,15	9,67	4,16	1,86	4,36	4,96
<b>F. Konstruksi</b>	3,54	4,81	5,75	0,03	0,12	8,15
<b>G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</b>	2,44	6,19	4,4	3,73	0,65	5,85
<b>H. Transportasi dan Pergudangan</b>	2,6	5,61	3,39	3,14	3,3	9,22
<b>I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	8,71	8,99	8,72	-1,41	1,51	8,25
<b>J. Informasi dan Komunikasi</b>	-0,05	0,03	3,05	5,6	5,92	5,38
Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan (perse)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>K. Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	-1,81	1,3	0,43	3,45	2,44	10,12
<b>L. Real Estat</b>	1,02	3,43	4,32	4,08	0,22	1,35
<b>M,N. Jasa Perusahaan</b>	0,85	2,94	3,06	-1,72	1,65	5,23
<b>O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib</b>	-0,32	3,15	3,38	-3,18	1,01	6,12
<b>P. Jasa Pendidikan</b>	8,8	9,21	4,97	5,28	2,24	2,32
<b>Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	7,55	8,38	4,48	17,65	14,16	4,23
<b>R,S,T,U. Jasa lainnya</b>	6,35	7,9	5,93	-1,02	1,08	6,35
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	0,55	-4,08	-2,15	-2,74	1,6	2,46

Sumber: BPS Kota Bontang, 2024

#### II.1.1.2 Produk Domestik Regional Bruto

Kinerja perekonomian suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dari seberapa besar nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan

produksi yang dihasilkan oleh suatu masyarakat dalam kurun waktu satu tahun yang berada di daerah atau regional tertentu.

Tabel 2.2 Struktur PDRB Kota Bontang Menurut Lapangan Usaha ADHB Tahun 2020-2022

Lapangan Usaha	Tahun (persen)		
	2020	2021	2022
<b>Industri Pengolahan</b>	79,28	79,42	78,72
<b>Konstruksi</b>	6,69	6,49	7,04
<b>Perdagangan</b>	3,4	3,3	3,32
<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	1,58	1,66	1,81
<b>Lapangan Usaha Lainnya</b>	9,05	9,13	9,11
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	100	100	100

Sumber: BPS Kota Bontang, 2024

Industri Pengolahan menjadi kontributor paling besar dalam struktur PDRB Kota Bontang menurut lapangan usaha ADHB Tahun 2020-2022. Terjadi penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 0,7 persen seperti yang ditunjukkan oleh tabel 2.2. Berbeda halnya dengan Lapangan Usaha Konstruksi sebagai kontributor kedua terbesar menunjukkan peningkatan nilai tambah bruto dalam PDRB Kota Bontang tahun 2022. Perannya naik dari 6,49 persen pada tahun 2021 menjadi 7,04 persen pada tahun 2022. Laju pertumbuhan sektor konstruksi ini mencapai 8,15 persen. Kenaikan yang cukup signifikan ini sebagian besar disumbang oleh adanya pembangunan pabrik di kawasan industri pengolahan CPO dan penyelesaian pembangunan pusat perbelanjaan baru di Kota Bontang.

Dengan pendekatan pengeluaran, distribusi PDRB Kota Bontang atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 masih sangat didominasi oleh komponen Net Ekspor dengan kontribusi mencapai 73,18 persen, disusul oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto 13,99 persen, Konsumsi Rumah Tangga 10,35 persen, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 1,90 persen, Pengeluaran Konsumsi LNPRT 0,55 persen dan Perubahan Inventori 0,02 persen. Secara absolut nilai PDRB Kota Bontang berdasarkan pengeluaran meningkat dari 57,9 triliun pada tahun 2021 menjadi 63,1 triliun pada tahun 2022. Peningkatan tersebut sebagian besar disumbang oleh terjadinya peningkatan aktivitas

perdagangan Kota Bontang khususnya ekopor komoditas batu bara, LNG, produk-produk petrokimia, dan produk olahan CPO.



Sumber: BPS Kota Bontang, 2024

Gambar 2. 2 Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Kota Bontang Tahun 2021- 2022 (persen)

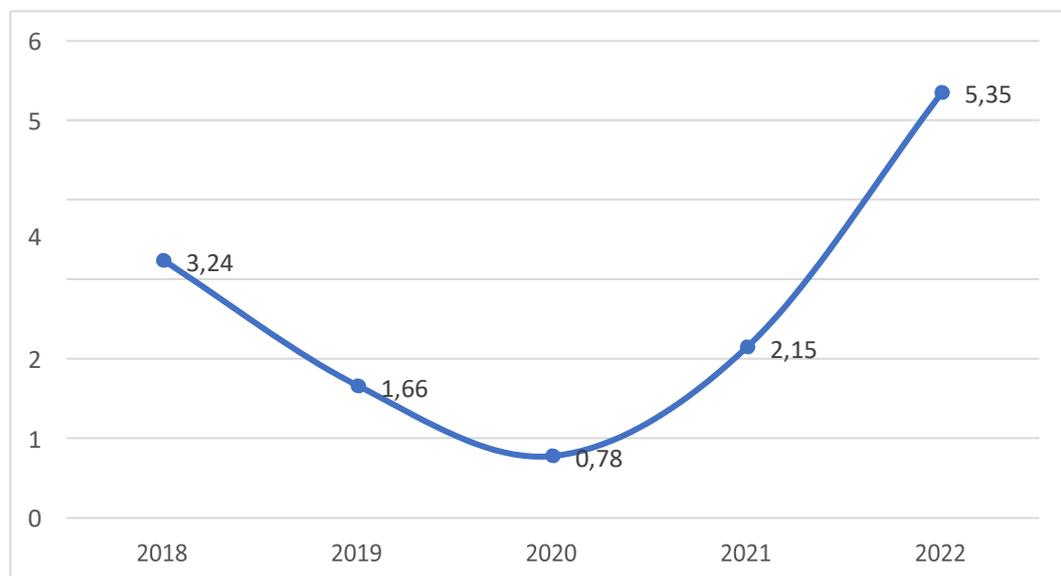
Pertumbuhan PDRB Kota Bontang yang mencapai 2,46 persen pada tahun 2022 ditopang oleh terjadinya pertumbuhan positif pada semua komponen PDRB pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang mencapai 6,72 persen yang dipengaruhi oleh meningkatnya belanja pembangunan pemerintah dalam rangka penguatan kebijakan pemulihan ekonomi pada tahun 2022. Selanjutnya diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto yang turut tumbuh 6,21 persen, komponen pengeluaran LNPRT 4,73 persen, komponen Perubahan Inventori 2,34 persen, komponen Net Ekspor 1,92 persen dan komponen Konsumsi Rumah Tangga 1,12 persen.

Kinerja perekonomian Kota Bontang yang relatif mengalami peningkatan hingga tahun 2022, baik pada sisi produksi maupun pengeluaran, meningkatkan optimisme akan terus terjadinya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 dan 2024 yang diharapkan dapat terjadi seiring dengan meningkatnya kinerja keuangan daerah dan prioritas pembangunan ekonomi yang menekankan pada peningkatan investasi, pariwisata dan UMKM. Prioritas kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD ini diharapkan dapat menjadi stimulasi efektif bagi peningkatan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2023-2024.

### II.1.1.3 Inflasi

Pada aspek kestabilan harga-harga, perkembangan tingkat inflasi Kota Bontang mengacu pada tingkat inflasi Provinsi Kalimantan Timur. Inflasi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tingkat inflasi tahun 2021. Inflasi (*y-o-y*) mencapai 5,35 meskipun masih lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional yang mencapai 5,51 pada tahun 2022. Peningkatan inflasi yang relatif signifikan dibandingkan dengan inflasi tahun 2021 ini, merupakan dampak dari peningkatan permintaan masyarakat seiring dengan kembali pulihnya ekonomi Kalimantan Timur pasca mengalami tekanan Pandemi COVID-19 pada tahun 2020-2021.

Dalam lingkup Kota Bontang, resiko inflasi relatif lebih rentan terjadi mengingat tingginya ketergantungan pasokan komoditas dari luar daerah. Oleh karena itu terganggunya distribusi/pasokan menjadi faktor utama yang akan menyebabkan tekanan inflasi. Hal inilah yang menjadi fokus utama kebijakan pengendalian inflasi daerah.



Sumber: BPS Kota Bontang 2024

Gambar 2. 3 Perkembangan Inflasi Kaltim

## II.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025

- Tantangan

Diperkirakan perekonomian masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dinamika ekonomi global, nasional maupun lokal yang terjadi selama beberapa tahun terakhir ini. Beragam tantangan tersebut antara lain:

- a. penurunan produksi industri pengolahan migas dan turunnya yang disebabkan oleh berkurangnya sumber pasokan gas alam ke Kota Bontang;
- b. kebijakan ekonomi hijau yang mendorong transformasi ekonomi menuju pembangunan yang rendah karbon dan ramah lingkungan;
- c. belum berkembangnya sektor ekonomi lokal untuk mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kota Bontang;
- d. ketergantungan Kota Bontang terhadap pengolahan migas yang belum mendorong terhadap berkembangnya sektor jasa dan perdagangan di Kota Bontang;

- Peluang

Ekonomi Kota Bontang tahun 2024 dan 2025 diperkirakan akan tumbuh positif meskipun dalam keterbatasan. Beberapa peluang yang akan mendukung perkembangan ekonomi makro di Kota Bontang adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan Ibu Kota Negara, diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi dan meningkatkan ekonomi di Kota Bontang sebagai daerah penyangga;
- b. Arah kebijakan pembangunan Kalimantan Timur terhadap Bontang yang mendorong inklusi industri eksisting dalam rangka membuka peluang lapangan kerja, yang diiringi dengan peningkatan daya saing SDM tenaga kerja, serta memperkuat peran sektor jasa dan perdagangan;
- c. transformasi industri pengolahan gas alam yang diharapkan mampu meningkatkan produksi dan peningkatan devisa negara;

- d. penemuan cadangan gas baru dari sumur eksplorasi North Ganai sebesar 5,3 TCF dengan kandungan kondensat diperkirakan mencapai 380 juta barel yang diharapkan dapat menjaga kelangsungan industri pengolahan gas alam di Kota Bontang dan industri lainnya yang menggunakan bahan baku gas alam; dan
- e. peluang pengembangan pariwisata di Kota Bontang terutama wisata bahari yang menjadi keunggulan di Kota Bontang.

Berdasarkan gambaran peluang dan potensi yang diperkirakan memberikan pengaruh terhadap perkembangan perekonomian dan pembangunan di Kota Bontang serta arah kebijakan pemerintah pusat dan provinsi Kalimantan Timur tahun 2023, maka perkiraan perekonomian Kota Bontang dicerminkan dalam indikator makro sebagai berikut:

Tabel 2.3 Realisasi dan Target Capaian Indikator Makro Kota Bontang Tahun 2022-2024

No	Indikator	Realisasi		Target	
		2022	2023	2024	2024
			Target RPJMD	Target RPJMD	Target RKPD
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,94	81,20	81,50	81,53
2	LPE (persen)	2,46	2,50	1,20	2,65
	LPE Non Migas (persen)	3,84	4,50	5,3	6,10
3	PDRB per Kapita	320,44	329,54	338,60	338,60
4	Kemiskinan (persen)	4,62	4,03	4,03	4,25
5	TPT (persen)	9,92	7,65	8,50	7,35
6	Indeks Gini (indeks)	0,340	0,320	0,300	0,320

Sumber: RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026

## II.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor penting dan strategis dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, berbagai kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran memerlukan dukungan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Semakin besar kapasitas keuangan daerah, maka sesungguhnya akan semakin banyak pilihan prioritas pembangunan yang dapat dilaksanakan sesuai urusan pemerintahan yang diemban. Namun demikian, perencanaan pembangunan daerah pada umumnya selalu dihadapkan pada situasi dimana kebutuhan pembangunan melampaui kemampuan keuangan daerah yang dapat dihimpun. Oleh sebab itulah diperlukan penyusunan perencanaan pembangunan agar

kemampuan keuangan daerah yang terbatas dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan keuangan daerah harus dirumuskan secara tepat dan akurat berdasarkan analisis perkembangan ekonomi daerah. Selain itu, agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan arah kebijakan keuangan yang tepat, diharapkan kondisi keuangan daerah juga akan semakin kondusif untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan. Kebijakan keuangan daerah di Kota Bontang pada tahun 2023 secara umum diarahkan:

1. Menjamin ketersediaan dana untuk membiayai program dan kegiatan prioritas, melalui kebijakan pendapatan tahun 2023 yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang berkelanjutan (*sustained*), serta menumbuhkan iklim usaha dan investasi yang kondusif.
2. Kebijakan belanja pada APBD Kota Bontang digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan program prioritas, sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2023.
3. Kebijakan pembiayaan tahun 2023 diarahkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui penguatan investasi Pemerintah Daerah.

### **II.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena besaran pendapatan akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, Pendanaan Transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah, serta Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran. Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Sesuai dengan tujuan desentralisasi fiskal, strategi Pemerintah Kota Bontang untuk semakin memandirikan pendanaan pembangunan ditempuh dengan mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal tersebut menjadi upaya yang terus dilakukan mengingat masih sangat besarnya ketergantungan fiskal daerah dari pendapatan transfer pemerintah pusat. Optimalisasi PAD dilakukan utamanya dengan meningkatkan perbaikan dan inovasi layanan perpajakan dan retribusi daerah. Disamping itu, pembaruan sejumlah kebijakan perpajakan dan retribusi daerah juga terus diupayakan agar potensi sumber-sumber PAD semakin optimal dalam menopang peningkatan pendapatan daerah.

Kebijakan umum dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah yang ditempuh antara lain:

1. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui:
  - Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah, terutama pajak yang memiliki potensi besar seperti PBB, BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame;
  - Peningkatan kualitas pelayanan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas dan Pengembangan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (TI) melalui penyederhanaan sistem dan prosedur serta memberikan banyak alternatif model layanan pembayaran kepada masyarakat;
  - Pembenahan manajemen penerimaan PAD terutama fokus pada pembenahan data wajib pajak dan objek pajak, kemudahan pembayaran pajak, peningkatan SDM terutama pemeriksa pajak dan appraisal/penilai objek pajak;
  - Meningkatkan potensi penerimaan pajak dan retribusi melalui penyesuaian tarif, kenaikan NJOP pada PBB/BPHTB, e-tax, keringanan pajak untuk wajib pajak dengan persyaratan tertentu, reward bagi wajib pajak taat pajak, dsb;
  - Mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Mengoptimalkan sumber pendapatan lain yang sah;

3. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah yang sudah ada untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah. Optimalisasi potensi pendapatan dari bagi hasil laba deviden terutama dari PDAM, Perusda AUJ, dan PT BME, serta Bank KaltimTara;
4. Mengoptimalkan sumber pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah (Pemerintah Provinsi).
5. Mengembangkan alternatif-alternatif pembiayaan pembangunan selain dari APBD, terutama melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Corporate Social Responsibility (CSR).

Disamping arah kebijakan di atas, penetapan target pendapatan daerah juga secara keseluruhan memperhatikan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya dan proyeksi tahun berjalan serta secara umum memperhatikan dinamika perkembangan ekonomi baik global, nasional dan daerah. berdasarkan pertimbangan tersebut, proyeksi pendapatan daerah Kota Bontang tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Bontang tahun 2024 ditargetkan dapat mencapai Rp1.955.661.674.692,00 Rencana Pendapatan ini lebih tinggi 10,46 persen dibandingkan dengan Penetapan Target Pendapatan untuk APBD tahun 2023 dan lebih tinggi 8,75 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Proyeksi tahun 2024 ini belum memperkirakan potensi pendapatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif fiskal, dan Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2024.
2. Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2024 diproyeksikan dapat mencapai Rp223.546.415.949,00 Perkiraan penerimaan PAD ini lebih tinggi 3,63 persen dibandingkan penetapan dalam APBD tahun 2023 dan lebih rendah 3,37 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Sumber terbesar kenaikan ini utamanya dikontribusikan dari pendapatan Pajak Daerah.
3. Sumber penerimaan daerah dari Pos Pendapatan Transfer direncanakan akan dapat mencapai Rp1.724.715.223.683,00. Perencanaan penerimaan pendapatan transfer ini lebih tinggi 11,57 persen dibandingkan dengan penetapan dalam APBD tahun 2023 dan lebih tinggi 14,12 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Pos pendapatan transfer utamanya bersumber dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dengan sumber utama dari alokasi

dana perimbangan yakni dari pos Pendapatan dana transfer umum baik dari Dana Bagi Hasil maupun dana alokasi umum. Optimisme target penerimaan Pendapatan Transfer mempertimbangkan akan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan informasi potensi penyaluran dana kurang salur pada tahun 2024.

4. Pada pos penerimaan pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp7.400.035.060 Perencanaan penerimaan pos lain-lain ini lebih rendah 14,68 persen dibandingkan dengan penetapan target dalam APBD tahun 2023.

Realisasi dan proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2021-2025 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2021-2025

Nomor	Uraian	2021 (Realisasi)	2022 (Realisasi)	2023 (APBD)	2024 (RKPD)	2025(RPJMD)
1	2	4	4	5	7	8
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.204.838.869.291,47</b>	<b>1.798.007.384.220,54</b>	<b>1.770.265.113.645,00</b>	<b>1.954.661.674.692,00</b>	<b>1.402.863.639.000,00</b>
<b>4,1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>245.901.865.622,19</b>	<b>231.351.605.844,18</b>	<b>215.721.973.057,00</b>	<b>223.546.415.949,00</b>	<b>222.424.863.000,00</b>
<b>04.01.01</b>	Hasil Pajak Daerah	116.883.388.141,45	134.539.080.196,35	130.000.000.000,00	132.361.704.115,00	117.767.455.000,00
<b>04.01.02</b>	Hasil Retribusi Daerah	2.937.297.589,01	3.959.818.810,90	4.146.678.500,00	3.677.854.568,00	4.704.457.000,00
<b>04.01.03</b>	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.747.614.686,87	3.847.655.621,23	4.205.520.097,00	4.075.813.311,00	3.540.236.000,00
<b>04.01.04</b>	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	123.333.565.204,86	89.005.051.215,70	77.369.774.460,00	83.431.043.955,00	96.412.715.000,00
<b>4,2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>935.722.089.535,00</b>	<b>1.511.309.158.077,95</b>	<b>1.545.869.489.420,00</b>	<b>1.724.715.223.683,00</b>	<b>1.178.438.776.000,00</b>
<b>04.02.01</b>	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	785.213.265.680,00	1.300.948.692.401,95	1.269.077.423.400,00	1.478.048.697.663,00	937.412.013.000,00
	- Dana Perimbangan	741.098.831.680,00	1.284.743.086.401,95	1.258.299.124.400,00	1.478.048.697.663,00	937.412.013.000,00
	- Dana Insentif Daerah	44.114.434.000,00	16.205.606.000,00	10.778.299.000,00	-	-
<b>04.02.02</b>	Pendapatan Transfer Antar Daerah	150.508.823.855,00	210.360.465.676,00	276.792.066.020,00	246.666.526.020,00	241.026.763.000,00
<b>4,3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>23.214.914.134,28</b>	<b>55.346.620.298,41</b>	<b>8.673.651.168,00</b>	<b>7.400.035.060,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>
<b>04.03.01</b>	Pendapatan hibah	1.684.146.824,19	2.451.187.971,22	1.500.000.000,00	1.684.139.648,00	-
<b>04.03.03</b>	Dana Darurat	-	-	-	-	-
<b>04.03.04</b>	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	21.530.767.310,09	52.895.432.327,19	7.173.651.168,00	5.715.895.412,00	2.000.000.000,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>1.204.838.869.291,47</b>	<b>1.798.007.384.220,54</b>	<b>1.770.265.113.645,00</b>	<b>1.955.661.674.692,00</b>	<b>1.344.127.972.450,00</b>

Sumber: Bapelitbang dan BPKAD Kota Bontang tahun 2023  
LRA 2020-2021 (BPKAD Kota Bontang)  
Target 2024 Bapenda, BPKAD, Bapelitbang (Analisis)

Ditinjau berdasarkan sumber-sumber pendapatan daerah, Kota Bontang masih sebagian besar ditopang oleh Pendapatan Transfer. Berdasarkan komposisi pendapatan daerah dalam APBD tahun 2021-2023, dengan struktur pendapatan mengacu pada PP Nomor 12 tahun 2011, peran Pendapatan Transfer masih berkontribusi rata-rata 88,20 persen, diikuti PAD 11,42 persen dan Lain-Lain Pendapatan sebesar 1,83 persen.

Tabel 2.5 Ringkasan Proyeksi Pendapatan RKPD tahun 2024

KODE REKENING	URAIAN	Alokasi
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.955.661.674.692,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>223.546.415.949,00</b>
<b>4.1.01</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>132.361.704.115,00</b>
<b>4.1.02</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>3.677.854.568,00</b>
<b>4.1.03</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>4.075.813.311,00</b>
<b>4.1.03.02</b>	Bagian laba yang dibagikan kepada Pemda (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD	4.075.813.311,00
<b>4.1.04</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	<b>83.807.270.291,00</b>
<b>4.1.04.01</b>	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	220.000.000,00
<b>4.1.04.01.01</b>	Hasil Penjualan Tanah	
<b>4.1.04.01.02</b>	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	200.000.000,00
<b>4.1.04.01.03</b>	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00
<b>4.1.04.01.05</b>	Hasil penjualan aset tetap lainnya	
<b>4.1.04.03</b>	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.150.401.068,00
<b>4.1.04.03.01</b>	Hasil Sewa BMD	1.268.938.500,00
<b>4.1.04.03.02</b>	Hasil kerjasama pemanfaatan BMD	631.462.568,00
<b>4.1.04.03.03</b>	Hasil dari Bangun Guna Serah	250.000.000,00
<b>4.1.04.05</b>	Jasa Giro	4.268.533.966,00
<b>4.1.04.05.01</b>	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.176.427.044,00
<b>4.1.04.05.02</b>	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	92.106.922,00
<b>4.1.04.07</b>	Pendapatan Bunga	
<b>4.1.04.11</b>	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	538.277.670,00
<b>4.1.04.12</b>	Pendapatan Denda Pajak Daerah	442.290.000,00
<b>4.1.04.13</b>	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	
<b>4.1.04.14</b>	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	50.000.000,00
<b>4.1.04.15</b>	Pendapatan dari Pengembalian	761.541.251,00
<b>4.1.04.16</b>	Pendapatan BLUD	75.000.000.000,00
<b>4.1.04.18</b>	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	624.726.336,00
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.724.715.223.683,00</b>
<b>4.2.01</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.478.048.697.663,00</b>
<b>4.2.01.01</b>	Dana Perimbangan	1.478.048.697.663,000
<b>4.2.01.01.01</b>	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	1.237.480.357.663,000
<b>4.2.01.01.02</b>	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	240.568.340.000,00
<b>4.2.01.01.03</b>	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	-
<b>4.2.01.01.04</b>	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	-
<b>4.2.01.02</b>	Dana Insentif Daerah (DID)	-

KODE REKENING	URAIAN	Alokasi
4.2.01.02.01	DID	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	246.666.526.020,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	246.666.526.020,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	7.400.035.060,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.684.139.648,00
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	1.684.139.648,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	5.715.895.412,00
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	-
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	
4.3.03.01.02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	
4.3.03.01.03	Lain-lain Pendapatan yang Sah	
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP	5.715.895.412,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	5.715.895.412,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan	125.000.000.000,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	

Sumber: BPKAD dan Bapenda Kota Bontang tahun 2023

Tabel 2.6 Komposisi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2023 dan Proyeksi 2024

Sumber Pendapatan Daerah	2021	2022	2023	Rata-Rata	2024	2024
	Realisasi	Realisasi	Target		Proyeksi RPJMD	Proyeksi RKPD
Pendapatan Asli Daerah (persen)	20,41	12,87	12,19	15,15	10,66	11,43
Pendapatan Transfer (persen)	77,66	84,05	87,32	83,01	88,88	88,19
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (persen)	1,92	3,08	0,49	1,83	0,46	0,39

Sumber: Bapelitbang Kota Bontang tahun 2023

Gambaran komposisi Pendapatan Daerah di atas menggambarkan masih sangat tingginya tingkat ketergantungan pembiayaan pembangunan daerah terhadap dana transfer yang sekaligus mencerminkan tingkat kemandirian fiskal yang rendah. Ketergantungan ini harus secara bertahap diturunkan agar pengembangan sektor-sektor ekonomi daerah dapat lebih optimal. Proporsi yang sangat besar Pendapatan Transfer dalam struktur pendapatan daerah menunjukkan celah fiskal (*fiscal gap*) yang lebar antara kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*). Jika situasi ini berlanjut akan menyebabkan pelaksanaan pembangunan menjadi tidak stabil sesuai dengan kebijakan dan kapasitas pemerintah dalam pengalokasian dana transfer ke daerah.

Memperhatikan dan membandingkan Proyeksi Pendapatan Daerah dalam RKPD tahun 2024 dengan Proyeksi tahun 2024 dalam RPJMD, dapat diuraikan bahwa Proyeksi target pendapatan daerah dalam RKPD tahun 2024 jauh lebih optimis dibandingkan dengan proyeksi yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2021-2026. Proyeksi Pendapatan daerah direncanakan dapat mencapai Rp1.955.661.674.692,00 lebih tinggi 45,50 persen dibandingkan dengan proyeksi pendapatan daerah dalam RPJMD untuk tahun 2024 yang ditargetkan sebesar Rp1.344.127.972.450,00. Adapun pos pendapatan yang mengalami kenaikan proyeksi penerimaan adalah pada sumber PAD yang dalam RPJMD diproyeksikan sebesar Rp214.844.927.950,00 dalam RKPD 2024 diproyeksikan sebesar Rp223.546.415.949,00 atau lebih tinggi 4,05 persen. Pendapatan Transfer dalam RKPD 2024 diproyeksikan sebesar Rp1.724.715.223.683,00, atau lebih tinggi 53,00 persen dibandingkan proyeksi RPJMD sebesar Rp1.127.283.044.500,00,-. Sedangkan pendapatan Lain-Lain juga diproyeksikan lebih tinggi sebesar Rp7.400.035.060,00,- atau lebih tinggi 270 persen dibandingkan proyeksi RPJMD yang diproyeksikan sebesar Rp2.000.000.000,-

Tabel 2.7 Proyeksi Pendapatan Daerah dalam RPJMD dan RKPD tahun 2024

Nomor	Uraian	2024 (RPJMD)	2024 (RKPD)	Selisih	Persen
1	2	3	4	5 (4-3)	
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.344.127.972.450,00</b>	<b>1.955.661.674.692,00</b>	<b>611.533.702.242,00</b>	<b>45,50</b>
<b>4,1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>214.844.927.950,00</b>	<b>223.546.415.949,00</b>	<b>8.412.987.999,00</b>	<b>4,05</b>
<b>04.01.01</b>	Hasil Pajak Daerah	113.840.458.000,00	132.361.704.115,00	18.521.246.115,00	<b>16,27</b>
<b>04.01.02</b>	Hasil Retribusi Daerah	4.480.435.050,00	3.677.854.568,00	-1.467.306.818,00	<b>-17,91</b>
<b>04.01.03</b>	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.371.652.900,00	4.075.813.311,00	704.160.411,00	<b>20,88</b>
<b>04.01.04</b>	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	93.152.382.000,00	83.431.043.955,00	-9.345.111.709,00	<b>-10,44</b>
<b>4,2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.127.283.044.500,00</b>	<b>1.724.715.223.683,00</b>	<b>597.432.520.183,00</b>	<b>53,00</b>
<b>04.02.01</b>	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	897.417.767.500,00	1.478.048.697.663,00	580.631.271.163,00	<b>64,70</b>
	- Dana Perimbangan	897.417.767.500,00	1.478.048.697.663,00	580.631.271.163,00	<b>64,70</b>
	- Dana Insentif Daerah	0	0	0,00	
<b>04.02.02</b>	Pendapatan Transfer Antar Daerah	229.865.277.000,00	246.666.526.020,00	16.801.249.020,00	<b>7,31</b>
<b>4,3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>7.400.035.060,00</b>	<b>5.400.035.060,00</b>	<b>270,00</b>
<b>04.03.01</b>	Pendapatan hibah	-	1.684.139.648,00		
<b>04.03.03</b>	Dana Darurat	-	-		
<b>04.03.04</b>	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000.000,00	5.715.895.412,00	3.715.895.412,00	<b>185,79</b>
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.344.127.972.450,00</b>	<b>1.955.661.674.692,00</b>	<b>611.245.543.242,00</b>	<b>54,16</b>

Sumber: Bapelitbang Bontang tahun 2023

## II.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Analisis proyeksi belanja daerah perlu dilakukan guna mendapatkan gambaran mengenai kondisi belanja daerah Kota Bontang tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi, realisasi belanja tahun-tahun sebelumnya dan kerangka prioritas pembangunan dalam RPJMD dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan tahun 2021-2026..

Perencanaan Belanja Daerah dalam RKPD tahun 2024 secara umum diarahkan pada pengelolaan belanja daerah yang dilaksanakan dengan pola proporsional, efisien dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran daerah. Oleh karena itu kebijakan Belanja Daerah pada tahun 2024 sepenuhnya diarahkan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD serta secara bersamaan mendukung prioritas dan kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RKP tahun 2024.

Berdasarkan perkembangan realisasi alokasi anggaran Belanja Daerah tahun 2021 dan 2022 serta penetapan Belanja Daerah dalam APBD tahun 2023, Belanja Operasi secara rata-rata per tahun mendominasi anggaran belanja daerah dengan proporsi mencapai 82,55 persen, diikuti Belanja Modal dengan proporsi rata-rata pertahun mencapai 17,09 persen. Adapun Belanja tak terduga proporsi rata-rata pertahunnya mencapai 0,35 persen.

Tabel 2.8 Perencanaan Komposisi Belanja Daerah

No	Komponen Belanja Daerah	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Rata-rata	2024 (RPJMD)	2024 (RKPD)
1	Belanja Operasi	86,48	82,48	78,68	82,55	81,51	73,54
2	Belanja Modal	13,01	17,32	20,95	17,09	18,14	26,15
3	Belanja Tidak Terduga	0,52	0,17	0,37	0,35	0,35	0,31
4	Transfer	-	0,02	-	-	-	-
5	Belanja Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Bapelitbang Bontang tahun 2023 (hasil analisis)

Kebijakan Belanja Daerah tahun 2024 secara umum diarahkan dalam rangka untuk mampu merealisasikan target capaian pembangunan yang ditetapkan berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2024. Oleh karena itu Kebijakan Belanja Daerah pada tahun 2024 mencakup prioritas sebagai berikut:

- a. Perencanaan Belanja Daerah Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan perkembangan belanja daerah tiga tahun terakhir dan memperhatikan hasil-hasil progress pelaksanaan program tahun berjalan;
- b. Perencanaan Belanja tahun 2024 mencakup Prioritas kegiatan pembangunan sebagai berikut:
  - Penataan sarana prasarana kota dan infrastruktur layanan publik;
  - Prioritas pembangunan strategis yang belum dapat diakomodir pada tahun sebelumnya;
  - Program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target SPM;
  - Program dan kegiatan pembangunan yang termasuk dalam kategori *Mandatory Spending* yang diatur Peraturan Perundang-undangan, seperti Anggaran fungsi Pendidikan minimal 20 persen, Anggaran Fungsi Kesehatan minimal 10 persen, Pendidikan dan pelatihan aparatur, serta Anggaran APIP minimal 0,50 persen.
  - Program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian target RPJMD yang harus dicapai pada tahun 2024.
- c. Belanja pegawai dibandingkan dengan seluruh belanja daerah sebagai komponen belanja wajib mengikat rasionya masih relative besar mencapai 33,11 persen. Hal ini menunjukkan belum idealnya perencanaan belanja daerah karena rasio belanja pegawai yang relatif besar tersebut berimplikasi pada semakin berkurangnya porsi belanja pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat seperti belanja modal untuk pembangunan fasilitas masyarakat dan belanja yang dibutuhkan untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi daerah. Rasio belanja pegawai selama tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan dengan rata-rata mencapai 40,34 persen dari total Belanja daerah.
- d. Proporsi Belanja Barang dan Jasa terhadap keseluruhan Belanja Daerah dalam perencanaan belanja tahun 2024 yang mencapai 37,33 persen masih perlu dikaji ulang efektivitasnya. Hal ini perlu dipertimbangkan agar alokasinya dapat lebih efisien sehingga dapat menghindari terjadinya pemborosan anggaran mengingat alokasi belanja barang dan jasa merupakan jenis belanja yang dialokasikan untuk penyediaan barang atau jasa yang masa manfaatnya kurang dari 12 bulan.
- e. Perencanaan belanja Hibah dan Bantuan Sosial ditargetkan alokasinya lebih rendah dibandingkan penetapan dalam APBD tahun 2024. Alokasi belanja hibah dan

bantuan sosial ini utamanya untuk mengakomodir Hibah dalam rangka penyelenggaraan pemilu kepala daerah serentak pada tahun 2024, hibah kepada Koni, Pramuka, PMI, dan belanja hibah dan bantuan sosial lainnya yang diampu Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Kepala Daerah. Pekiraan Belanja Hibah belum memasukkan belanja hibah yang dapat bersumber dari alokasi belanja DAK.

- f. Pengalokasian Belanja Hibah secara prinsip mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam pengalokasiannya harus selaras dengan prioritas program dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2021-2026.
- g. Perencanaan Belanja Modal secara umum dialokasikan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang belanjanya dalam bentuk asset tetap berwujud dan memiliki manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Belanja Modal tersebut mencakup antara lain Belanja tanah, pembangunan Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Mesin, Belanja Modal jalan dan irigasi serta belanja asset tetap lainnya sesuai prioritas pembangunan tahun 2024. Proporsi belanja modal direncanakan mencapai 25,22 persen dari keseluruhan Belanja Daerah dan mencapai 35,51 persen dari DTU.
- h. Alokasi Belanja Tak Terduga pada tahun 2024 direncanakan dengan asumsi telah sepenuhnya kembali normal pasca pandemi covid 19. Oleh karena itu alokasi Belanja Tak terduga disiapkan seperti sebelum pandemi covid 19 dialokasikan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah. Dalam RKPD tahun 2024, Belanja Tak Terduga direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00.

Berdasarkan kebijakan dan asumsi ini, perencanaan belanja daerah dalam RKPD tahun 2024 di sajikan sebagai berikut:

Tabel 2.9 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2025

No	Uraian	APBD 2021 (Realisasi)	APBD 2022 (Realisasi)	2023 (APBD)	RKPD 2024 (Proyeksi)	RKPD 2025 (Proyeksi)
1	2	3	4	5	6	7
<b>II</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.313.584.747.975,00</b>	<b>1.444.578.830.579,71</b>	<b>1.810.265.113.645,00</b>	<b>2.080.661.674.692,00</b>	<b>1.512.863.639.000,00</b>
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.135.950.145.791,00</b>	<b>1.191.545.901.239,71</b>	<b>1.424.402.449.683,00</b>	<b>1.549.322.029.952,00</b>	<b>1.181.903.639.000,00</b>
	Belanja Pegawai	582.342.264.961,00	548.463.610.192,11	700.955.767.106,00	688.813.190.379,00	584.590.000.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	533.418.586.673,00	600.544.251.142,60	651.747.794.430,00	776.721.057.635,00	577.813.639.000,00
	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
	Belanja Hibah	20.189.294.157,00	39.655.249.905,00	70.018.888.147,00	82.787.781.938,00	18.000.000.000,00
	Belanja Bantuan Sosial	-	2.882.790.000,00	1.680.000.000,00	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>170.833.945.579,00</b>	<b>250.247.642.640,00</b>	<b>379.201.204.147,00</b>	<b>524.839.644.740,00</b>	<b>325.960.000.000,00</b>
	Belanja Tanah	-	2.387.756.800,00	-	4.500.000.000,00	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	41.136.861.923,00	86.743.381.712,00	62.646.850.117,00	58.655.612.706,00	-
	Belanja Gedung dan Bangunan	53.104.046.206,00	57.127.100.859,00	107.798.401.659,00	208.799.701.784,00	-
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	68.230.227.537,00	101.770.176.243,00	205.825.568.171,00	252.343.664.874,00	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.794.029.913,00	1.475.251.236,00	1.081.576.500,00	40.665.376,00	-
	Belanja Aset Lainnya	6.568.780.000,00	743.975.790,00	1.848.807.700,00	500.000.000,00	-
<b>3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>6.800.656.605,00</b>	<b>2.472.539.660,00</b>	<b>6.661.459.815,00</b>	<b>6.500.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>
	Belanja Tidak Terduga	6.800.656.605,00	2.472.539.660,00	6.661.459.815,00	6.500.000.000,00	5.000.000.000,00
<b>4</b>	<b>Transfer</b>		<b>312.747.040,00</b>			
	Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan	-	312.747.040,00	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.313.584.747.975,00</b>	<b>1.444.578.830.579,71</b>	<b>1.810.265.113.645,00</b>	<b>2.080.661.674.692,00</b>	<b>1.512.863.639.000,00</b>

Sumber: Bapelitbang Kota Bontang tahun 2023, LRA 2021-2022 (BPKAD Kota Bontang)

Perencanaan Belanja Daerah dalam RKPD Tahun 2024 secara signifikan melampaui proyeksi dalam RPJMD tahun 2021-2023. Perencanaan Belanja Daerah dalam RKPD tahun 2024 mencapai Rp2.080.661.674.692,00 atau lebih tinggi 44,08 persen dibandingkan dengan proyeksi Belanja Daerah dalam RPJMD yang mencapai Rp1.444.127.972.450,00. Dengan proyeksi pendapatan yang sangat optimis pada tahun 2024, maka kebijakan perencanaan daerah dilakukan penyesuaian sehingga seluruh kelompok belanja menunjukkan alokasi yang lebih besar dibandingkan dengan proyeksi dalam RPJMD. Kebijakan peningkatan belanja daerah yang meningkat signifikan pada tahun 2024 ini diharapkan dapat menutupi target kinerja pembangunan yang belum tercapai hingga tahun 2023 dan mengakselerasi pencapaian target-target RPJMD.

Tabel 2.10 Proyeksi Belanja Daerah RPJMD dan Proyeksi RKPD Tahun 2024

No	Uraian	2024 (Proyeksi RPJMD)	RKPD 2024 (Proyeksi)	Selisih
1	2	3	4	5
<b>II</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.444.127.972.450,00</b>	<b>2.080.661.674.692,00</b>	<b>636.533.702.242,00</b>
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.177.127.972.450,00</b>	<b>1.549.322.029.952,00</b>	<b>372.194.057.502,00</b>
	Belanja Pegawai	563.000.000.000,00	688.813.190.379,00	125.813.190.379,00
	Belanja Barang dan Jasa	573.127.972.450,00	776.721.057.635,00	203.593.085.185,00
	Belanja Bunga	-	-	
	Belanja Subsidi	-	-	
	Belanja Hibah	40.000.000.000,00	82.787.781.938,00	42.787.781.938,00
	Belanja Bantuan Sosial	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>262.000.000.000,00</b>	<b>524.839.644.740,00</b>	<b>262.839.644.740,00</b>
	Belanja Tanah	-	4.500.000.000	
	Belanja Peralatan dan Mesin	-	58.655.612.706	
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	208.799.701.784	
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	252.343.664.874	
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	40.665.376	
	Belanja Aset Lainnya	-	500.000.000	
<b>3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>6.500.000.000,00</b>	<b>1.500.000.000,00</b>
	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	6.500.000.000,00	1.500.000.000,00
<b>4</b>	<b>Transfer</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b></b>
	Transfer Bagi Hasil Pajak & Retribusi	-	0	
	Bantuan Keuangan	-	0	
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.444.127.972.450,00</b>	<b>2.080.661.674.692,00</b>	<b>636.533.702.242,00</b>

Sumber: Bapelitbang Kota Bontang tahun 2023

## II.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah yaitu semua penerimaan yang perlu dibayarkembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali. baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun anggaran sebelumnya. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi maupun untuk memanfaatkan surplus anggaran.

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA). pencairan dana cadangan. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. penerimaan pinjaman daerah. penerimaan kembali pemberian pinjaman. penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran. harus diantisipasi kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah. sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran. harus diantisipasi kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah. seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir. proyeksi/target tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam bentuk tabel dengan format sebagai berikut :

Tabel 2.11 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2021-2025

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2022	APBD tahun 2023	Proyeksi RKPD 2024	Proyeksi Tahun 2025
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>262.626.959.210,64</b>	<b>62.983.793.938,91</b>	<b>50.000.000.000,00</b>	<b>125.000.000.000,00</b>	<b>135.000.000.000,00</b>
Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	262.626.959.210,64	62.983.793.938,91	50.000.000.000,00	125.000.000.000,00	135.000.000.000,00
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>-</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Daerah	-	20.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	-
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>262.626.959.210,64</b>	<b>42.983.793.938,91</b>	<b>40.000.000.000,00</b>	<b>125.000.000.000,00</b>	<b>135.000.000.000,00</b>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan ( SILPA )	109.459.093.624,13	396.412.347.579,74	-	125.000.000.000	-

Sumber : Bapelitbang Kota Bontang dan BPKAD Kota Bontang tahun 2023

Proyeksi Penerimaan Pembiayaan dalam RKPD sepenuhnya mempertimbangkan informasi terkait perkiraan potensi terjadinya SiLPA pada tahun 2023, khususnya terkait dengan adanya potensi penghematan belanja dan pelampauan penerimaan pendapatan daerah. Proyeksi struktur pembiayaan daerah dalam RKPD tahun 2024 ini berbeda dengan proyeksi struktur pembiayaan dalam RPJMD tahun 2024.

Dalam Struktur Pembiayaan Daerah dalam RPJMD diproyeksikan Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari SiLPA sebesar Rp.137.500.000.000,00. Kemudian pada pos Pengeluaran Pembiayaan diproyeksikan penyertaan Modal sebesar Rp.47.500.000.000,00, sehingga proyeksi Pembiayaan Netto dapat mencapai Rp.90.000.000.000,00. Sedangkan dalam RKPD tahun 2024 Penerimaan Pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp.125.000.000.000,00 sehingga pembiayaan Netto yang dapat dipergunakan untuk menutup defisit belanja daerah adalah sebesar Rp125.000.000.000,00

Tabel 2.12 Perbandingan Pembiayaan Daerah dalam RPJMD dan RKPD

Uraian	Proyeksi RPJMD Tahun 2024	Proyeksi RKPD 2024	Selisih
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>137.500.000.000,00</b>	<b>125.000.000.000,00</b>	<b>122.500.000.000</b>
Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) tahun sebelumnya	137.500.000.000,00	125.000.000.000,00	-122.500.000.000
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>47.500.000.000</b>		<b>-27.500.000.000</b>
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
Penyertaan Modal Daerah	47.500.000.000		-27.500.000.000
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>90.000.000.000,00</b>	<b>125.000.000.000,00</b>	<b>-85.000.000.000</b>

Sumber: Bapelitbang Kota Bontang Tahun 2023

Berdasarkan kebijakan Pembiayaan Daerah sebagaimana diuraikan di atas, dapat dirumuskan bahwa dalam rangka menutup defisit belanja daerah, Perkiraan Pembiayaan Netto akan dipergunakan untuk menutup selisih belanja dengan pendapatan daerah. Dengan demikian secara keseluruhan kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan belanja pembangunan daerah Kota Bontang tahun 2024 adalah sebesar Rp2.080.661.674.692,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.13 Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024

URAIAN	PROYEKSI RPJMD 2024	PROYEKSI RKPD 2024
<b>PENDAPATAN</b>		
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	214.844.927.950,00	223.546.415.949,00
<b>Pendapatan Transfer</b>	1.127.283.044.500,00	1.724.715.223.683,00
<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	2.000.000.000,00	7.400.035.060,00
<b>Jumlah Pendapatan (1)</b>	<b>1.344.127.972.450,00</b>	<b>1.955.661.674.692,00</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>		
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>		
<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SILPA)</b>	137.500.000.000,00	125.000.000.000,00
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan (2)</b>	<b>137.500.000.000,00</b>	<b>125.000.000.000,00</b>
<b>TOTAL PENERIMAAN (1 + 2)</b>	<b>1.481.627.972.450,00</b>	<b>2.080.661.674.692,00</b>

Sumber: Bapelitbang Kota Bontang tahun 2023

### BAB III

#### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### III.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pada tahun anggaran 2024 anggaran belanja daerah yang dialokasikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang setelah perubahan APBD adalah sebesar Rp 25.864.101.974,00 dengan realisasi anggaran mencapai Rp 24.174.938.943,00 atau 93,47 persen.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang selama tahun 2023 dapat dilihat secara ringkas pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.1**  
**IKHTISAR TARGET DAN REALISASI KINERJA KEUANGAN**  
**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Uraian	Target Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran
1	<b>BELANJA DAERAH</b>				
2	<b>BELANJA OPERASI</b>				
3	Belanja Pegawai	8.690.264.972,00	8.547.052.135,00	98,35	143.212.837,00
4	Belanja Barang dan Jasa	16.319.457.481,00	14.882.675.058,00	91,20	1.436.782.423,00
5	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>25.009.722.453,00</b>	<b>23.429.727.193,00</b>	<b>93,68</b>	<b>1.579.995.260,00</b>
6	<b>BELANJA MODAL</b>				
7	Belanja Peralatan dan Mesin	627.258.521,00	571.175.000,00	91,06	56.083.521,00
8	Belanja Gedung dan Bangunan	227.121.000,00	174.036.750,00	76,63	53.084.250,00
9	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>854.379.521,00</b>	<b>745.211.750,00</b>	<b>87,22</b>	<b>109.167.771,00</b>
10	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>25.864.101.974,00</b>	<b>24.174.938.943,00</b>	<b>93,47</b>	<b>1.689.163.031,00</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa Realisasi Belanja Operasi yang diperuntukkan untuk belanja pegawai mencapai Rp 8.547.052.135,00 atau 98,35 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 8.690.264.972,00 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 14.882.675.058,00 atau 91,20 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 16.319.457.481,00. Sedangkan Realisasi Belanja Modal yang diperuntukkan untuk belanja peralatan dan mesin sebesar Rp. 571.175.000,00 atau 91,06 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 627.258.521,00. Dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 174.036.750,00 atau 76,63 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 227.121.000,00.

Realisasi Belanja Operasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp 23.429.727.193,00 atau 93,68 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 25.009.722.453,00 dan realisasi belanja modal sebesar Rp 745.211.750,00 atau 87,22 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 854.379.521,00 .

Belanja Operasi dan Belanja Modal adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Pada tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan 4 Program, 15 Kegiatan dan 59 Sub Kegiatan yang secara umum outputnya dapat direalisasikan dengan baik dengan serapan anggaran rata-rata 93,47 persen. Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan belanja langsung tahun 2024 berdasarkan pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan digambarkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2**  
**Daftar Pagu Anggaran Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**  
**Tahun anggaran 2024**

No.	Nama Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik	Sisa Anggaran
			Rp.	%	%	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.565.984.972	8.427.182.135	98,38	100	138.802.837
2	Pengadaan Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	197.110.000	192.170.000	97,49	100	4.940.000
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	269.471.000	239.339.255	88,82	100	30.131.745
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.412.989	19.958.000	93,21	100	1.454.989
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.006.301.113	926.940.912	92,11	100	79.360.201
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115.160.840	113.772.500	98,79	100	1.388.340
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.246.612	28.131.750	96,19	100	1.114.862
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.800.000	21.824.504	95,72	100	975.496
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.023.895.000	1.930.100.757	95,37	100	93.794.243
10	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.444.000	67.270.000	82,60	100	14.174.000
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.500.000	9.500.000	100,00	100	-
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	733.741.706	625.881.059	85,30	100	107.860.647
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	538.237.000	507.940.776	94,37	100	30.296.224
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.698.040	13.545.975	35,93	100	24.152.065
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	230.901.000	177.816.750	77,01	100	53.084.250
16	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	15.074.000	14.200.000	94,20	100	874.000
17	Pelaksanaan Konsultasi Publik	39.210.000	36.775.000	93,79	100	2.435.000
18	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	11.914.000	11.431.000	95,95	100	483.000
19	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	136.662.705	112.844.880	82,57	100	23.817.825
20	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	7.696.000	7.100.000	92,26	100	596.000
21	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	2.863.844.528	2.623.546.556	91,61	100	240.297.972
22	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	54.788.000	51.464.812	93,93	100	3.323.188
23	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	233.880.000	231.002.880	98,77	100	2.877.120
24	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	104.359.364	85.652.003	82,07	100	18.707.361
25	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	691.601.185	526.724.990	76,16	100	164.876.195
26	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	789.739.050	630.504.181	79,84	100	159.234.869
27	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD)	60.665.257	60.001.610	98,91	100	663.647

No	Nama Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik %	Sisa Anggaran
			Rp.	%		
28	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	8.806.000	7.665.000	87,04	100	1.141.000
29	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	25.347.770	23.959.270	94,52	100	1.388.500
30	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	387.479.135	283.730.061	73,22	100	103.749.074
31	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	74.169.570	73.455.934	99,04	100	713.636
32	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	17.760.000	17.739.000	99,88	100	21.000
33	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	18.217.735	17.303.830	94,98	100	913.905
34	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	111.317.838	110.632.190	99,38	100	685.648
35	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	59.968.270	59.746.851	99,63	100	221.419
36	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5.888.000	5.840.000	99,18	100	48.000
37	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	31.117.270	30.947.000	99,45	100	170.270
38	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	121.190.000	120.799.415	99,68	100	390.585
39	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4.228.905	4.080.000	96,48	100	148.905
40	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5.838.905	5.645.000	96,68	100	193.905
41	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	17.644.905	17.313.000	98,12	100	331.905
42	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	676.489.470	609.204.320	90,05	100	67.285.150
43	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	18.242.905	17.519.000	96,03	100	723.905
44	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2.008.905	1.980.000	98,56	100	28.905
45	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	9.338.905	9.265.000	99,21	100	73.905
46	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1.365.124.499	1.326.694.770	97,18	100	38.429.729
47	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	40.733.150	33.946.900	83,34	100	6.786.250
48	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1.638.905	1.628.905	99,39	100	10.000
49	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3.118.905	3.088.905	99,04	100	30.000
50	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	660.791.305	597.595.250	90,44	100	63.196.055
51	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	348.840.240	316.844.746	90,83	100	31.995.494
52	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	518.984.382	518.840.647	99,97	100	143.735
53	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	14.342.000	3.420.000	23,85	100	10.922.000
54	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	1.254.958.851	1.179.355.219	93,98	100	75.603.632
55	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	406.645.490	370.336.576	91,07	100	36.308.914
56	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	9.172.000	5.963.000	65,01	100	3.209.000
57	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	128.749.300	120.203.948	93,36	100	8.545.352
58	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	604.481.098	570.772.721	94,42	100	33.708.377
59	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	19.129.000	16.800.200	87,83	100	2.328.800
<b>Jumlah Total</b>		<b>25.864.101.974</b>	<b>24.174.938.943</b>	<b>93,47</b>	<b>100</b>	<b>1.689.163.031</b>

Penjelasan Tabel 3.2 di atas menunjukkan bahwa Realisasi anggaran program/kegiatan tahun 2024 sebagai berikut :

B. Sub Kegiatan yang realisasi belanjanya 60 s/d 90% adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3  
Daftar Capaian Realisasi Belanja Sub Kegiatan antara 60% – 90 %

No.	Nama Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	
			Rp.	%
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	269.471.000	239.339.255	88,82
2	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.444.000	67.270.000	82,60
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	733.741.706	625.881.059	85,30
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	230.901.000	177.816.750	77,01
5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	136.662.705	112.844.880	82,57
6	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	104.359.364	85.652.003	82,07
7	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	691.601.185	526.724.990	76,16
8	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	789.739.050	630.504.181	79,84
9	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	8.806.000	7.665.000	87,04
10	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	387.479.135	283.730.061	73,22
11	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	40.733.150	33.946.900	83,34
12	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	9.172.000	5.963.000	65,01
13	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	19.129.000	16.800.200	87,83
<b>Jumlah Total</b>		<b>3.503.239.295</b>	<b>2.814.138.279</b>	<b>80,33</b>

Dari tabel di atas, Sub Kegiatan yang capaian realisasinya antara 60% s.d 90% karena adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan serta kurangnya monitoring dan evaluasi internal. Sub Kegiatan yang realisasi belanjanya kurang dari 60% adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4  
Daftar Capaian Realisasi Belanja Sub Kegiatan yang kurang dari 60%

No.	Nama Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	
			Rp.	%
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.698.040	13.545.975	35,93
2	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	14.342.000	3.420.000	23,85
<b>Jumlah Total</b>		<b>52.040.040</b>	<b>16.965.975</b>	<b>32,60</b>

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar 35,93% dikarenakan tidak terserapnya Belanja Pemeliharaan Komputer sebesar Rp. 31.167.065
- Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan sebesar 23,85% karena tidak terserapnya Belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp. 9.842.000 yang sudah dianggarkan sebelumnya.

### III.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

1. Realisasi belanja perjalanan dinas pada satu sub kegiatan yang belum terserap dengan baik yaitu Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dimana masih menyisakan Rp. 111.664.444. dari total anggaran sebesar Rp. 1.188.942.000.

Adapun perjalanan dinas di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang tidak sepenuhnya memenuhi target dikarenakan perjalanan dinas disesuaikan dengan undangan yang diterima dari pihak eksternal serta disesuaikan dengan tugas dan fungsi pegawai sehingga pegawai dibatasi untuk melakukan perjalanan dinas diluar tugas dan fungsinya.

2. Monitoring dan evaluasi internal kegiatan pada setiap bidang kurang maksimal, sehingga ada 13 Sub Kegiatan yang capaian realisasinya di rentang 60%-90% .
3. Tidak optimalnya koordinasi antar bidang terkait dengan penjadwalan kegiatan perbidang untuk kegiatan yang sama seperti asistensi, monev, koordinasi dan sinkronisasi juga menjadi kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
4. Anggaran kas yang dibuat tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Untuk kegiatan yang berupa kajian pelaksanaannya baru pada waktu anggaran perubahan padahal kajian itu sendiri, seperti pengambilan data/observasi membutuhkan waktu.
6. Penambahan anggaran yang sangat besar sehingga kinerja keuangan tidak optimal.

Dari keenam hal tersebut diatas, menyebabkan pencapaian realisasi keuangan tidak mencapai 100%.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **IV.1. Entitas Akuntansi**

Entitas akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya diwajibkan menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sebagai satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah sebagai entitas pelaporan.

#### **IV.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang tahun anggaran 2017 adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas serta Basis kas untuk pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan.

#### **IV.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Sedangkan Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Basis pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Dalam

hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah. Pendapatan LRA dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. **Belanja** diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto sesuai dengan realisasi pengeluaran kas atau sesuai dengan dokumen pengeluaran yang sah. Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan
3. Penerimaan **pembiayaan** dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Penerimaan pembiayaan dilaksanakan sebesar kas yang telah diterima sedangkan Pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan.
4. **Pendapatan-LO** dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
5. **Beban** diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*). Beban penyusutan/amortisasi dilakukan dengan Metode garis lurus (*straight line method*).
6. **Kas** diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
7. **Persediaan** disajikan sebesar :
  - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
  - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi;

Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis, diakui sebagai barang cetakan

dan dinilai sebesar biaya perolehan terakhir. Harga pokok produksi persediaan, meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

8. **Beban persediaan** dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional. Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang sifatnya terus menerus dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat – obatan. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti alat tulis kantor.
9. **Aset tetap** dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, ditambah pengeluaran – pengeluaran lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung ke dalam aset tersebut ke kondisi siap untuk digunakan. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
10. **Aset tidak berwujud** adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh

aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, biaya riset dan pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Kota Bontang. Aset tidak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya (masa manfaat untuk aset tidak berwujud selama 5 tahun). Amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode akuntansi.

11. **Kewajiban** pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya
12. **Ekuitas** disajikan sebesar selisih antara aset dan kewajiban. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

#### **IV.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan**

Proses penyusunan laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang berpedoman pada Peraturan Walikota Bontang Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bontang yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan laporan keuangan tahun 2015 di lingkungan pemerintah Kota Bontang telah menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013, sehingga kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan, mulai diterapkan pada penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2017.

## **BAB V**

### **PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

#### **V.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan**

Bagian ini membahas secara rinci mengenai akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ), Neraca, Laporan Operasional ( LO ) , Laporan Perubahan Ekuitas ( LPE ) . Selain itu menjelaskan pula mengenai posisi perubahan ekuitas tahun anggaran 2024. Penjelasan atas akun-akun tersebut didasarkan pada urutan penyajian laporan dalam Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2024.

##### **V.1.1 Laporan Realisasi Anggaran**

###### **V.1.1.1 Pendapatan-LRA**

Pendapatan - LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kota Bontang, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kota Bontang.

Saldo akun-akun pendapatan-LRA sampai dengan 31 Desember 2023 adalah NIHIL. Hal ini dikarenakan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang tidak mengelola anggaran pendapatan daerah.

###### **V.1.1.2 Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kota Bontang.

Rincian mengenai alokasi Belanja Daerah dan realisasi pengeluaran yang telah dilakukan baik melalui Kas Daerah maupun Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
<b>BELANJA</b>				
<b>BELANJA OPERASI</b>				
Belanja Pegawai	8.690.264.972,00	8.547.052.135,00	98,35	6.831.679.159,00
Belanja Barang dan Jasa	16.319.457.481,00	14.882.675.058,00	91,20	12.447.549.217,00
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>25.009.722.453,00</b>	<b>23.429.727.193,00</b>	<b>93,68</b>	<b>19.279.228.376,00</b>
<b>BELANJA MODAL</b>				
Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	627.258.521,00	571.175.000	91,06	1.452.585.675,00
Belanja Gedung dan Bangunan	227.121.000,00	174.036.750,00	0,00	860.678.700,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>854.379.521,00</b>	<b>745.211.750,00</b>	<b>87,22</b>	<b>2.313.264.375,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>25.864.101.974,00</b>	<b>24.174.938.943,00</b>	<b>93,47</b>	<b>21.592.492.751,00</b>

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 24.174.938.943,00 atau 93,47 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 25.864.101.974,00 terdiri dari:

- Belanja Operasi, terealisasi sebesar Rp 23.429.727.193,00 atau 93,68 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 25.009.722.453,00 dan
- Belanja Modal, terealisasi sebesar Rp 745.211.750,00 atau 87,22 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 854.379.521,00

Realisasi belanja tahun anggaran 2024 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Uraian Belanja	Realisasi Belanja (Rp)		Naik/Turun	
	TA 2024	TA 2023	(Rp)	%
BELANJA OPERASI	23.429.727.193,00	19.279.228.376,00	4.150.498.817,00	21,53
BELANJA MODAL	745.211.750,00	2.313.264.375,00	(1.568.052.625,00)	(67,79)
<b>Jumlah</b>	<b>24.174.938.943,00</b>	<b>21.592.492.751,00</b>	<b>2.582.446.192,00</b>	<b>11,96</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi Belanja Operasi pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 21,53 persen dan realisasi Belanja Modal mengalami penurunan sebesar 67,79 persen.

- Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kota Bontang yang memberi manfaat jangka pendek.

Pos Belanja Operasi terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
1	<b>BELANJA</b>				
2	<b>BELANJA OPERASI</b>				
3	Belanja Pegawai	8.690.264.972,00	8.547.052.135,00	98,35	6.831.679.159,00
4	Belanja Barang dan Jasa	16.319.457.481,00	14.882.675.058,00	91,20	12.447.549.217,00
5	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>25.009.722.453,00</b>	<b>23.429.727.193,00</b>	<b>93,68</b>	<b>19.279.228.376,00</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pengeluaran tahun 2024 untuk belanja operasi adalah sebesar Rp 23.429.727.193,00 terdiri dari pos belanja pegawai sebesar Rp 8.547.052.135,00 dan pos belanja barang dan jasa sebesar Rp 14.882.675.058,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi pengeluaran pos belanja operasi tahun 2023, maka terjadi kenaikan realisasi pengeluaran sebesar Rp 4.150.498.817,00 atau 21,5 persen.

Berikut penjelasan ringkas mengenai realisasi belanja operasi tahun 2024:

1. Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 8.547.052.135,00 dipergunakan untuk :
  - a. Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp 2.802.234.419,00 diperuntukkan bagi pembayaran gaji dan tunjangan ASN.
  - b. Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp 5.582.956.916,00 di peruntukkan bagi pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan prestasi kerja ASN.
  - c. Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp 161.860.800,00 di peruntukkan bagi pembayaran Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola keuangan dan Belanja Honorarium Pengadaan barang dan jasa

Rincian realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	%
1	Gaji dan Tunjangan ASN	2.843.432.396,00	2.802.234.419,00	98,55
2	Tambahan Penghasilan ASN	5.680.179.976,00	5.582.956.916,00	98,29
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	166.652.600,00	161.860.800,00	97,12
<b>Jumlah Belanja Pegawai</b>		<b>8.690.264.972,00</b>	<b>8.547.052.135,00</b>	<b>98,35</b>

- d. Realisasi Belanja Barang dan jasa tahun anggaran 2024 sebesar Rp 14.882.675.058,00 atau 91,20 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar

Rp 16.319.457.481,00 Realisasi pos belanja ini terutama digunakan untuk belanja bahan pakai habis, belanja jasa Kantor, belanja Iuran Jaminan/Asuransi, belanja sewa peralatan dan mesin, belanja sewa aset tetap lainnya, belanja jasa konsultansi Non konstruksi, belanja kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan Pelatihan, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja perjalanan dinas dalam dan luar negeri dan belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/Pihak lain/Masyarakat. Pengeluaran belanja barang ini melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang selama tahun 2024.

Rincian pos Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	%
1	Belanja Bahan Pakai Habis	3.074.832.075,00	2.662.571.643,00	86,59
2	Belanja Jasa Kantor	5.037.408.800,00	4.650.431.368,00	92,32
3	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	32.332.206,00	24.392.234,00	75,44
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	69.069.400,00	67.889.312,00	98,29
5	Belanja Sewa Aset tetap Lainnya	58.830.000,00	56.000.000,00	95,19
6	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	727.500.000,00	727.486.400,00	99,99
7	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta pendidikan dan pelatihan	436.500.000,00	410.585.550,00	94,06
8	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	189.556.000,00	153.484.043,00	80,97
9	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.440.179.000,00	5.935.310.948,00	92,16
10	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	150.000.000	91.273.560,00	60,85
11	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	103.250.000,00	103.250.000,00	100,00
<b>Jumlah Belanja Barang Dan Jasa</b>		<b>16.319.457.481,00</b>	<b>14.882.675.058,00</b>	<b>91,20</b>

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis sebesar Rp 2.662.571.643,00 atau 86,59 persen ditujukan untuk Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor alat tulis kantor, Belanja Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Benda Pos, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Perabot Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Listrik, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Suvenir/Cendera Mata, Belanja Natura dan Pakan Natura, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu, Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan,

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH), Belanja Pakaian Batik Tradisional dan Belanja Pakaian Olahraga.

- Realisasi Belanja Jasa Kantor sebesar Rp 4.650.431.368,00 atau 92,32 persen diperuntukkan untuk Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, Belanja Jasa Tenaga Penanganan prasarana dan Sarana Umum, Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan, Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi, Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan, Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan, dan Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan.
- Realisasi Belanja luran Jaminan/Asuransi sebesar Rp 24.392.234,00 atau 75,44 persen terutama ditujukan untuk Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN, dan Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN.
- Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp 67.889.312,00 atau 98,29 persen ditujukan untuk Belanja Sewa Alat Pengangkat, Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang, Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang, Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) dan Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya.
- Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 56.000.000,00 atau 95,19 persen ditujukan untuk Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya.
- Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp 727.486.400,00 atau 99,99 persen terutama diperuntukkan untuk Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei
- Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp 410.585.559,00 atau 94,06 persen ditujukan untuk Belanja Kursus Singkat Pelathan dan Belanja Bimbingan Teknis.
- Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 150.529.435,00 atau 88,45 persen ditujukan untuk Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor

Penumpang, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua, Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer dan Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer

- Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp 5.935.310.948,00 atau 92,16 persen ditujukan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja perjalanan Dinas Dalam Kota, dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam dan Luar Kota.
- Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp. 91.273.560,00 atau 60,85 persen ditujukan untuk Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri.
- Realisasi Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp. 103.250.000,00 atau 100 persen ditujukan untuk Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan.

b) Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2024 sebesar Rp 745.211.750,00 atau 87,22 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 854.379.521,00 yang merupakan realisasi Belanja peralatan dan mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi belanja Modal tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp 1.568.052.625,00 atau 67,79 persen.

Rincian realisasi belanja Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	%
1	Belanja Modal Alat Bantu	3.971.759,00	1.985.000,00	49,98
2	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	81.444.000,00	67.270.000,00	82,60
3	Belanja Modal Alat Kantor	38.923.236,00	37.200.000,00	95,57
4	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	28.849.568,00	28.250.000,00	97,92
5	Belanja Modal Alat Studio	17.262.300,00	15.000.000,00	86,89
6	Belanja Modal Alat Komunikasi	20.651.973,00	0,00	-
7	Belanja Modal Komputer Unit	407.450.383,00	400.820.000,00	98,37
8	Belanja Modal Peralatan Komputer	28.705.302,00	20.650.000,00	71,94
9	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	227.121.000,00	174.036.750,00	76,63
<b>Jumlah Belanja Modal</b>		<b>854.379.521,00</b>	<b>745.211.750,00</b>	<b>87,22</b>

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin dan aset lainnya tahun 2024 terutama ditujukan untuk melengkapi peralatan dan perlengkapan kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang.

## V.1.2 Neraca

### V.1.2.1 Aset

#### V.1.2.1.1 Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar meliputi kas dan setara kas serta persediaan. Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 467.600,00.

#### a. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 adalah nol atau nihil. Penyetoran sisa Uang Persediaan tahun anggaran 2024 sebesar Rp 67.427.675,00 telah disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2024.

#### b. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan. Setiap akhir periode pelaporan dilakukan inventarisasi fisik yang hasilnya digunakan sebagai dasar pengakuan persediaan pada Neraca.

Saldo Persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 467.600,00

#### V.1.2.1.2 Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan operasional atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai aset tetap yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 3.161.205.774,00

Rincian aset tetap dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Jenis Aset	Nilai Aset
1	Peralatan dan Mesin	11.436.837.109,00
2	Gedung dan Bangunan	-
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
4	Aset Tetap Lainnya	110.476.600,00
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-
6	Akumulasi Penyusutan	(8.386.107.935,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>3.161.205.774,00</b>

## ❖ Peralatan dan Mesin

Saldo asset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 11.436.837.109,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, saldo aset peralatan dan mesin mengalami kenaikan sebesar Rp 501.959.700,00. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Awal 1 Januari 2024</b>	<b>Rp 10.934.877.409</b>
<b>Mutasi Bertambah</b>	
- Belanja Peralatan dan mesin TA 2024	Rp 571.175.000
- Mutasi Masuk	Rp 177.816.750
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 11.683.869.159</b>
<b>Mutasi Berkurang</b>	
- Mutasi Keluar	Rp 8.800.000
- Reklas ke beban jasa	Rp -
- Penghapusan	Rp 238.232.050
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 247.032.050</b>
<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2024</b>	<b>Rp 11.436.837.109</b>

Penambahan nilai Aset Peralatan dan Mesin tahun 2024 adalah sebesar Rp 501.959.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penambahan nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dipengaruhi oleh realisasi belanja tahun 2024 yaitu realisasi belanja peralatan dan mesin TA. 2024 sebesar Rp 571.175.000,00 yang terdiri dari :
  - Belanja Modal Alat Bantu sebesar 1.985.000
  - Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp. 67.270.000,00
  - Belanja Modal Alat Kantor sebesar Rp. 37.200.000,00
  - Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebesar Rp. 28.250.000,00
  - Belanja Modal Alat Studio sebesar Rp 15.000.000,00
  - Belanja Modal Komputer Unit sebesar Rp. 400.820.000,00
  - Belanja Modal Peralatan Komputer sebesar Rp. 20.650.000,00
- 2) Mutasi masuk sebesar Rp. 177.816.750,00 dengan rincian:
  - Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp. 177.816.750 berupa Partisi.
- 3) Mutasi keluar yaitu reklas ke persediaan dari Belanja Modal Peralatan Komputer lainnya sebesar Rp. 8.800.000 berupa 4 buah SSD Hardisk Eksternal @Rp.2.200.000
- 4) Terdapat mutasi kurang usulan penghapusan berdasarkan Surat Walikota Nomor:

000.2.4/123/BPKAD/2024 Tanggal 07 Februari 2024 perihal: Persetujuan Ijin Prinsip Penjualan BMD Berupa Kendaraan dan Barang Inventaris pada Perangkat Daerah, sebesar Rp. 238.232.050 Berupa 1 unit sepeda motor Rp. 5.000.000; 1 unit kendaraan roda 4 Rp. 118.232.050; dan 1 unit kendaraan roda 4 Rp. 115.000.000

❖ **Aset Tetap Lainnya**

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang dan tercatat di neraca meliputi koleksi perpustakaan dan buku.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 tidak mengalami peningkatan dari saldo tahun 2023 sebesar Rp 110.476.600,00. Hal ini disebabkan tidak adanya mutasi bertambah maupun berkurang terhadap Aset Tetap Lainnya baik melalui pembelian, donasi, mutasi aset maupun reklasifikasi.

❖ **Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Bontang telah menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang mengamanatkan penyajian akumulasi penyusutan pada Neraca. Saldo akumulasi penyusutan aset tetap sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 8.386.107.935,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kelompok Aset Tetap	Nilai Perolehan s/d 31 Desember 2024	Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2023	Beban Penyusutan periode Tahun 2023	Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2024	Nilai Buku per 31 Desember 2024
1	Tanah					
2	Peralatan dan Mesin	11.436.837.109,00	7.077.857.115,00	1.308.250.820,00	8.386.107.935,00	3.050.729.174,00
3	Gedung dan Bangunan					
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan					
5	Aset Tetap Lainnya	110.476.000,00	-	-	-	110.476.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>11.547.313.109,00</b>	<b>7.077.857.115,00</b>	<b>1.308.250.820,00</b>	<b>8.386.107.935,00</b>	<b>3.161.205.174,00</b>

V.1.2.1.3 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Saldo Aset Lainnya yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang per 31 Desember 2023 sebesar Rp 61.438.109,00 terdiri dari :

NO	URAIAN ASET LAINNYA	NILAI ASET (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	3.026.142.812,00
2	Aset Lain-lain	240.392.695,00
3	Mutasi Keluar	-
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(2.970.398.167,00)
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(234.699.231,00)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		<b>61.438.109</b>

a) Aset Tak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 55.744.645,00 terdiri dari:

NO	NAMA ASET	NILAI ASET (Rp)
1	Software/Aplikasi Komputer	1.527.226.812,00
2	Hasil Kajian	1.498.916.000,00
3	Mutasi	-
4	Akumulasi Amortisasi	(2.970.398.167,00)
<b>JUMLAH</b>		<b>55.744.645</b>

b) Aset Lain-Lain

Pos aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif, aset yang belum bernilai dan aset yang memerlukan penelusuran lebih lanjut. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif direklasifikasi ke dalam aset lain-lain setelah ada usulan penghapusan dari Perangkat Daerah.

Aset Lain-Lain yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang merupakan aset tetap yang telah diusulkan untuk penghapusan aset karena kondisi aset tersebut rusak berat dan telah dihentikan penggunaannya dari kegiatan operasional.

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 5.693.464,00 tidak mengalami perubahan dari tahun 2023 terdiri dari :

<b>Saldo Awal Januari 2024</b>		<b>240.392.695,00</b>
<b>Mutasi Berkurang</b>		
-	Akumulasi Penyusutan	234.699.231,00
<b>Saldo Akhir 31 Desember 2024</b>		<b>5.693.464,00</b>

c) Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 2.970.398.167,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Aset Lainnya	Nilai Perolehan s/d 31 Desember 2024	Akumulasi amortisasi s/d 31 Desember 2023	Beban amortisasi periode Tahun 2024	Akumulasi Amortisasi s/d 31 Desember 2024	Nilai Buku per 31 Desember 2024
1	Software/Aset lainnya	1.527.226.812,00	1.439.592.309,00	31.889.858,00	1.471.482.167,00	55.744.645,00
2	Hasil Kajian	1.498.916.000,00	1.498.916.000,00	-	1.498.916.000,00	-
3	Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>3.026.142.812,00</b>	<b>2.938.508.309,00</b>	<b>31.889.858,00</b>	<b>2.970.398.167,00</b>	<b>55.744.645,00</b>

#### V.1.2.2 Kewajiban

##### V.1.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

##### V.1.2.2.1.1 Utang Belanja

Utang Belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 413.885.973,00 Nilai ini merupakan besaran tunjangan kinerja tidak tetap PNS , bulan Desember 2024 yang pembayarannya akan dilaksanakan pada bulan berikutnya sesuai ketentuan pasal 28 ayat (2) Peraturan Walikota Bontang Nomor 16 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Walikota Bontang Nomor 188.342/14/BKPP.03 Tahun 2018 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pada Perangkat Daerah.

##### V.1.2.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang per 31 Desember 2022, tidak ada atau nihil.

#### V.1.2.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kota Bontang yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Bontang. Nilai Ekuitas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 3.442.866.810,00

Jumlah Aset	Rp	3.223.111.483,00	
Jumlah Kewajiban	Rp	413.885.973,00	-
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>Rp</b>	<b>2.809.225.510,00</b>	

Perubahan ekuitas tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut:

<b>1</b>	<b>Ekuitas Awal (Ekuitas Akhir 2023)</b>	3.442.866.810,00
<b>2</b>	<b>dikurangi</b>	
	- Surplus/defisit - LO	(24.808.580.243,00)
<b>3</b>	<b>ditambah</b>	
	- RK PPKD	24.174.938.943,00
<b>4</b>	<b>Ekuitas Akhir 31 Desember 2024</b>	2.809.225.510,00

### V.1.3 Laporan Operasional ( LO )

#### V.1.3.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Saldo akun-akun pendapatan-LO sampai dengan 31 Desember 2023 adalah NIHIL. Hal ini dikarenakan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang tidak mengelola anggaran pendapatan daerah.

#### V.1.3.2 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah daerah.

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Sedangkan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Selama tahun 2024, Beban Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang adalah sebesar Rp 24.808.580.243,00 terdiri dari

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Beban Pegawai	8.561.002.762,00
2	Beban Barang	2.663.591.788,00
3	Beban Jasa	5.960.526.464,00
4	Beban Pemeliharaan	153.484.043,00
5	Beban Perjalanan Dinas	6.026.584.508,00
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.340.140.678,00
7	Beban Lain-lain	103.250.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>24.808.580.243,00</b>

Berikut ini akan diuraikan penjelasan ringkas mengenai Beban tahun 2024 sebagai berikut:

a) Beban Pegawai

Beban pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 8.561.002.762,00 terdiri dari:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Beban Gaji Pokok PNS	1.813.878.229,00
2	Beban Gaji Pokok PPPK	166.586.754,00
3	Beban Tunjangan Keluarga PNS	148.601.886,00
4	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	11.212.600,00
5	Beban Tunjangan Jabatan PNS	111.090.000,00
6	Beban Tunjangan Fungsional PNS	155.740.000,00
7	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	23.390.400,00
8	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	37.900.000,00
9	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.270.000,00
10	Beban Tunjangan Beras PNS	90.162.900,00
11	Beban Tunjangan Beras PPPK	8.907.660,00
12	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10.477.274,00
13	Beban Pembulatan Gaji PNS	29.492,00
14	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2.445,00
15	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	189.079.512,00
16	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	15.670.079,00
17	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.756.809,00
18	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	338.316,00
19	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	11.270.539,00
20	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.014.904,00
21	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.322.369.093,00
22	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	123.732.079,00
23	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	537.457.078,00
24	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	36.217.021,00
25	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	138.507.112,00
26	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	7.469.278,00
27	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.312.296.373,00
28	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	122.493.229,00
29	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	130.201.700,00
30	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	27.880.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>8.561.002.762,00</b>

b) Beban Barang

Beban Barang Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 2.663.591.788,00 terdiri dari:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	346.875.540,00
2	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	381.416.449,00
3	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	81.803.500,00
4	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	12.860.000,00
5	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	156.932.159,00
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	22.538.287,00
7	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	19.958.000,00
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	12.600.000,00
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	85.347.949,00
10	Beban Natura dan Pakan-Natura	83.179.900,00
11	Beban Makanan dan Minuman Rapat	1.214.707.500,00
12	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	70.544.004,00
13	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	42.438.500,00
14	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	60.390.000,00
15	Beban Pakaian Batik Tradisional	72.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>2.663.591.788,00</b>

c) Beban Jasa

Beban jasa Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 5.960.526.464,00 terdiri dari:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	187.820.000,00
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	668.950.000,00
3	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	450.000.000,00
4	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	90.000.000,00
5	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	175.725.000,00
6	Beban Jasa Tenaga Administrasi	431.055.825,00
7	Beban Jasa Tenaga Ahli	2.446.624.000,00
8	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	9.000.000,00
9	Beban Jasa Pelayanan Kearsipan	23.741.600,00
10	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	25.932.375,00
11	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	26.000.000,00
12	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	124.467.000,00
13	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	14.857.168,00
14	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	16.828.400,00
15	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.361.704,00
16	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.202.130,00
17	Beban Sewa Alat Pengecat	2.600.000,00
18	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	14.000.000,00
19	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	20.000.000,00
20	Beban Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	31.289.312,00
21	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	56.000.000,00
22	Beban Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	727.486.400,00
23	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	135.000.000,00
24	Beban Bimbingan Teknis	275.585.550,00
<b>JUMLAH</b>		<b>5.960.526.464,00</b>

d) Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 153.484.043,00 terdiri dari:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	9.782.000,00
2	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	122.069.958,00
3	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10.284.150,00
4	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	2.547.935,00
5	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	8.800.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>153.484.043,00</b>

e) Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 6.026.584.508,00 terdiri dari:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	5.621.433.548,00
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.100.000,00
2	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	102.217.400,00
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	194.560.000,00
4	Beban Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	91.273.560,00
<b>JUMLAH</b>		<b>6.026.584.508,00</b>

f) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 1.340.140.678,00 terdiri dari:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	1.308.250.820,00
2	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	31.889.858,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.340.140.678,00</b>

g) Beban Lain-lain

Beban Lain-lain Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 103.250.000,00 terdiri dari:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	103.250.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>103.250.000,00</b>

V.1.3.3 Surplus/Defisit Kegiatan Operasional

Dalam kegiatan operasional tahun 2024, berdasarkan realisasi pendapatan sebesar Rp 0,00 atau Nihil (karena tidak mengelola anggaran pendapatan) dan realisasi beban sebesar Rp 24.808.580.243,00 maka Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang mengalami defisit sebesar (Rp 24.808.580.243,00.)

V.1.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

V.1.4.1 Komponen Perubahan Ekuitas

Komponen Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Ekuitas untuk dikonsolidasikan, Dampak Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dan Ekuitas Akhir.

Berikut ini akan diuraikan penjelasan ringkas mengenai Komponen Perubahan Ekuitas tahun 2024 sebagai berikut:

a) Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang adalah sebesar Rp 3.442.866.810,00 Nilai ini merupakan hasil pengurangan Ekuitas Akhir tahun 2023 (basis kas) dengan jumlah Defisit LO ditambah dengan realisasi belanja operasi dan belanja modal sampai dengan 31 Desember 2023.

<b>1</b>	<b>Ekuitas Awal (Ekuitas Akhir 2023)</b>	3.442.866.810,00
<b>2</b>	<b>dikurangi</b>	
	- Surplus/defisit - LO	(24.808.580.243,00)
<b>3</b>	<b>ditambah</b>	
	- RK PPKD	24.174.938.943,00
<b>4</b>	<b>Ekuitas Akhir 31 Desember 2024</b>	2.809.225.510,00

b) Surplus Defisit (LO)

Surplus Defisit (LO) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang tahun 2024 adalah sebesar (Rp 24.808.580.243,00) yang dihasilkan dari transaksi menutup akun Surplus/Defisit-LO.

c) Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain RK PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah). Adapun saldo RK PPKD Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang adalah sebesar Rp. 24.174.938.943,00 yang menambah ekuitas.

d) Dampak Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang tahun 2024 merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas pada tahun 2024, antara lain:

➤ Koreksi Nilai Persediaan	Rp	0,00
➤ Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	0,00
➤ Lain - lain	Rp	0,00

e) Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang Tahun 2024 adalah sebesar Rp 2.809.225.510,00 dan apabila dibandingkan dengan ekuitas awal tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp 633.641.300,00 atau turun 22,56 %.

**V.2 Pengungkapan atas pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.**

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang sebagai entitas akuntansi menerapkan basis akrual sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Untuk menyusun Neraca Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, harus membuat jurnal untuk melakukan rekonsiliasi atas belanja yang terealisasi selama tahun 2024, antara lain:

1. Jurnal Penutup untuk Pendapatan dan Belanja

Pada tanggal 31 Desember 2024

<b>Nama Akun</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
Pendapatan	Rp -	
Surplus/Defisit-LRA	Rp 24.174.938.943,00	
Belanja		Rp 24.174.938.943,00

2. Persediaan

Pada tanggal 31 Desember 2024

<b>Nama Akun</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
Kertas dan Cover	Rp 557.000,00	
Bahan Komputer	Rp 14.385.500,00	
Perabot Kantor	Rp 1.486.845,00	
Ekuitas		Rp 16.429.345,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 16.429.345,00</b>	<b>Rp 16.429.345,00</b>

3. Belanja Modal/Pengadaan Aset

Pada saat terjadi Pengadaan Belanja Modal:

<b>Nama Akun</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
Belanja Modal	Rp 745.211.750,00	
RK PPKD		Rp 745.211.750,00

Pada saat dicatat sebagai Aset:

<b>Nama Akun</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
Aset Tetap	Rp 745.211.750,00	
Ekuitas		Rp 745.211.750,00

## BAB VI

### PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

#### VI.1. Domisili Entitas

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang beralamatkan di Jl. Moch. Roem Gedung Griya Graha Taman Praja Blok IV Lt 1 Bontang, dan dibentuk berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

#### VI.2. Sifat Operasi

Otonomi Daerah sebagaimana yang tersurat maupun tersirat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pada hakekatnya adalah pembagian kewenangan dan pengelolaan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah serta pemberian kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing-masing dalam asas Desentralisasi.

Bertitik tolak dari hakekat otonomi yang cukup luas tersebut, perencanaan pembangunan sebagai salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan atau manajemen pemerintahan akan lebih berat dan harus diupayakan untuk dapat memberikan kontribusi dalam menunjang kelancaran jalannya pelaksanaan pemerintah daerah.

Pemerintah Kota Bontang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, menetapkan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang sebagai Perangkat Daerah Tipe A, dan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Bapperida Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan dan memiliki tugas pokok dalam **“Membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah”**.

Untuk penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusun kebijakan teknis bidang perencanaan ,Penelitian dan Pengembangan

- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan , Penelitian dan Pengembangan
- c. Pemantauan , Evaluasi , dan Pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan , Penelitian dan Pengembangan
- d. Pembinaan Teknis Penyelenggaraan fungsi – fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan , penelitian dan Pengembangan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya

### **VI.3. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**

Struktur organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang terdiri dari:

- 1. Kepala Badan;
- 2. Sekretariat, membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- 3. Bidang Pembangunan Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan
- 4. Bidang Pembangunan Manusia, Pemerintahan, Aparatur dan Kesejahteraan Rakyat
- 5. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 6. Bidang Riset dan Inovasi Daerah
- 7. Unit Pelaksana Teknis; dan
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang-bidang sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Sub bagian-sub bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Gambar 6.1

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang



**VI.4. Sumberdaya Manusia**

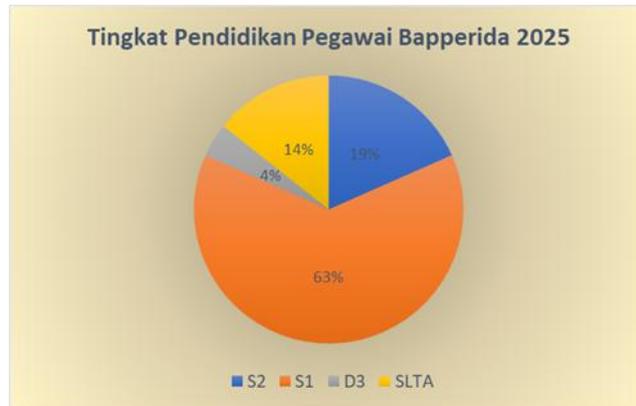
Sumber daya manusia merupakan salah satu kunci dan berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Jumlah pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bontang pada 31 Januari 2025, tercatat sebanyak 489 orang pegawai yang terdiri dari 36 orang PNS, 4 orang PPPK dan 9 orang Non PNS.

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Bapperida terdiri dari 31 pria dan 18 wanita. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas adalah lulusan S1 (sebanyak 31 orang), sisanya adalah S2 (9 orang), D1/D3 (2 orang), SMA (7 orang). Data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 6.1**  
**Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**(Desember 2024)**

No	Uraian	S2	S1	D3	SLTA	Jumlah
1	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	2	7	2	5	16
3	Bidang Pembangunan Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan	1	7	-	-	8
4	Bidang Pembangunan Manusia, Pemerintahan, Aparatur dan Kesejahteraan Rakyat	1	8	-	-	9
5	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2	6	-	-	8
6.	Bidang Riset dan Inovasi Daerah	2	3	-	2	7
TOTAL		9	31	2	7	49

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang, 2025



Grafik 6.1 Tingkat Pendidikan Pegawai Bapperida Kota Bontang

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Bapperida Kota Bontang adalah: 1 (satu) orang Eselon II; 5 (lima) orang Eselon III terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris dan 4 (empat) orang kepala bidang; 2 (dua) orang Eselon IV dan Fungsional Perencana 12 (Dua Belas), Fungsional Pranata Komputer 2 (dua) orang, Fungsional Analisis SDM Aparatur 1 (satu) orang dan non eselon sebanyak 26 orang sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 6.3**  
**Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat Dan Golongan**  
**(Desember 2024)**

Status Kepegawaian/Pangkat	Gol./Ruang	Kepala Badan		Unit Kerja di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah										Total	
				Sekretariat		Bidang PPIKa		Bidang PMPAKes		Bidang P2EPD		Bidang RIDA			
				Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr		Lk
<b>A. Struktural (PNS)</b>															
1. Pembina Utama Muda	IV/c	1													1
2. Pembina Tingkat I	IV/b			1											1
3. Pembina	IV/a			2		1	1				1	1			6
4. Penata Tingkat I	III/d						2			2	2	1	1		8
5. Penata	III/c					1							1		2
6. Penata Muda Tk. I	III/b							1				1		1	3
7. Penata Muda	III/a			3	1		3	1	1	1					10
8. Pengatur Tk. I	II/d												2		2
9. Pengatur	II/c			1	1										2
10. Pengatur Muda Tk. I	II/b														0
<b>B. Fungsional (PNS)</b>															
1. Perencana Ahli Muda	III/d						2			2	1	1			6
2. Penata Ruang Ahli Pertama	III/c														0
3. Perencana Ahli Muda	III/c					1									1
4. Penata Ruang Ahli Pertama	III/b														0
5. Perencana Ahli Pertama	III/b										1				1
6. Penata Ruang Ahli Pertama	III/a														0
7. Perencana Ahli Pertama	III/a						1		1		1				3
8. Pranata Komputer Terampil	II/c				1										1
<b>C. Fungsional (PPPK)</b>															
1. Pranata Komputer Ahli Pertama	IX 2023-10-01			1											1
2. Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	IX 2023-10-01				1										1
3. Perencana Ahli Pertama	IX 2024-03-01							1		1					
<b>D. Pegawai Honoror</b>															
		-	-	1	4	-	-	1	1	-	1	-	1	1	11
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>49</b>	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bontang, 2025

## BAB VII

### PENUTUP

Penyajian Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 ini disusun sebagai Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Laporan Keuangan ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, khususnya pasal 259 ayat (1) yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Laporan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 294 ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Penyusunan Laporan Keuangan Bapelitbang Tahun 2024 ini disusun dengan menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, khususnya pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015.

Demikian Laporan ini disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bontang, 26 Maret 2025

Pengguna Anggaran,



*[Handwritten Signature]*  
**I. Amiruddin, MP**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19650505 199303 1 013**